

**ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JENEPONTO**

**Azwar Wijaya Syam<sup>1\*</sup>, Irham<sup>2</sup>, Sudirman<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan, Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Bisnis Digital, Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, Makassar, Indonesia

Email Korespondensi: azwarwijasyam@gmail.com

Email: irhamsopol@gmail.com; Sudirmanabdi@gmail.com

**ABSTRACT**

Analysis of E-Government Implementation Readiness in Supporting Governance at the Department of Communication and Informatics of Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. Based on the research problem, the objective of this study is to analyze the level of readiness for e-government implementation in supporting governance at the Department of Communication and Informatics of Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The research method used is a qualitative approach with a descriptive qualitative design to examine the readiness of e-government implementation at the Department of Communication and Informatics of Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The analytical method includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the readiness for e-government implementation in supporting governance at the Department of Communication and Informatics of Jeneponto Regency, South Sulawesi Province, is categorized as fairly ready but not yet optimal. The main strengths include the use of core applications (SIMAKDA, SIPD, and SIMBADA) that are relatively user-friendly, the official portal that provides information transparency, and the provision of support and incentives for employees to improve their ICT skills. However, several challenges remain, including misaligned policies between central and regional levels, a shortage of IT personnel, network instability in certain areas, and inadequate data security systems. These conditions lead to issues such as delays in digital public services, low efficiency in data integration, cybersecurity risks, and difficulties in maintaining service sustainability. Therefore, to enable the Department of Communication and Informatics to achieve a more efficient, secure, and sustainable standard of digital governance, improvements in infrastructure, regulations, and human resource capacity are required.

**Keywords:** E-Government, Governance, Implementation, Public Administration.

**ABSTRAK**

Analisis Kesiapan Penerapan *e-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka disusun tujuan penelitian untuk Menganalisis tingkat kesiapan penerapan *e-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana kesiapan penerapan *e-government* pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jeneponto. Metode analisis yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan penerapan *e-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto dikategorikan sebagai cukup siap tetapi belum

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

112

Indexed



SINTA 4



optimal. Keunggulan utama termasuk aplikasi inti (SIMAKDA, SIPD, dan SIMBADA) yang relatif mudah digunakan, portal resmi yang memberikan keterbukaan informasi, dan dukungan dan insentif kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan ICT mereka. Namun demikian, banyak tantangan masih dihadapi. Ini termasuk kebijakan yang tidak selaras di tingkat pusat dan daerah, kekurangan tenaga IT, ketidakstabilan jaringan di beberapa bagian, dan sistem keamanan data yang tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan masalah seperti keterlambatan layanan publik digital, rendahnya efisiensi integrasi data, risiko keamanan siber, dan masalah dalam menjaga keberlanjutan layanan. Oleh karena itu, untuk memungkinkan Diskominfo Kabupaten Jeneponto mencapai standar pemerintahan digital yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan infrastruktur, regulasi, dan kapasitas SDM.

**Kata kunci:** E-Government, Pemerintahan, Penerapan, Tata Kelolah.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mendorong pemerintah untuk menerapkan *e-government* dalam setiap aktivitasnya agar dapat memberikan peningkatan layanan publik bagi setiap masyarakat. Setelah menerapkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001, Indonesia telah menerapkan *e-government* dan memperkuatnya melalui kebijakan SPBE yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Namun, hasil evaluasi nasional menunjukkan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kesiapan pemerintah daerah masih berada pada kategori "cukup", dengan rata-rata indeks 2,63 dari skala 5, dan dari 560 pemerintah daerah yang dievaluasi, hanya sekitar 243 yang memiliki arsitektur SPBE. Ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan dalam adopsi digital antar daerah yang ada di Indonesia.

*E-government* masih terhambat oleh sejumlah masalah, terutama pada tingkat organisasi perangkat daerah. Ketergantungan pada proses manual, keterbatasan infrastruktur jaringan dan perangkat keras, literasi digital yang rendah, dan pemanfaatan aplikasi yang belum optimal adalah beberapa masalah. Kondisi ini juga disebabkan oleh sistem keuangan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi dan kekurangan pekerja IT.

Diskominfo Kabupaten Jeneponto telah mulai menggunakan *e-government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang kinerja yang lebih baik. Portal digital [bkad.sulselprov.go.id](http://bkad.sulselprov.go.id) menawarkan akses langsung ke informasi keuangan, menunjukkan kemajuan dalam transparansi publik. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang menyeluruh yang menilai kesiapan internal Diskominfo Kabupaten Jeneponto untuk menerapkan *e-government*. Penilaian ini sangat penting karena banyak faktor memengaruhi kesiapan *e-government*, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan, integrasi aplikasi, dan keamanan data.

Studi ini baru karena secara khusus dapat menilai kesiapan penerapan *e-government* di Diskominfo Kabupaten Jeneponto, yang merupakan lembaga pengelola keuangan daerah di tingkat provinsi. Diharapkan bahwa analisis menyeluruh ini akan memberikan gambaran tanpa bias tentang kondisi kesiapan internal dan berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan strategi digitalisasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Administrasi publik merupakan bagian dari bidang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana pemerintah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik agar dapat memberikan kontribusi atas pembangunan. Kajian ini tidak hanya membahas struktur organisasi pemerintahan, juga membahas bagaimana kebijakan dibuat, program dilaksanakan, dan bagaimana negara dan masyarakat berinteraksi satu sama lain. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan publik diterapkan dengan cara yang paling menguntungkan bagi semua orang. Pelaksanaan kebijakan publik melalui hubungan dan aktivitas organisasi antara aparat negara dan warga dikenal sebagai administrasi publik dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik (Sismar, et.al, 2023). Teknologi komputasi awan memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan *e-government* dan data yang disimpan di dalamnya dari

berbagai perangkat karena data dan aplikasi *e-government* dihosting di server yang dimiliki oleh penyedia layanan (Sudirman, et ,el 2024) Di era kontemporer saat ini, definisi administrasi publik telah berkembang. Dianggap tidak lagi semata-mata sebagai tindakan negara tetapi juga sebagai interaksi antara sektor publik dan swasta. Frank Marini mengatakan bahwa administrasi publik terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan sebagai praktik profesional, dan yang kedua adalah bidang akademik yang mempelajari praktik tersebut secara menyeluruh. Teori, praktik, dan arti saling mendukung.

*E-government* biasanya didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah (Darmawan et al., 2020:3). Salah satu proyek yang bertujuan untuk menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan publik adalah *e-government*, juga dikenal sebagai pemerintahan elektronik. Menurut Rifdan et al. (2024), *e-government* diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah administratif dan pelayanan yang selama ini dihadapi. Ini termasuk digitalisasi prosedur administrasi dan penyediaan layanan publik secara online. Selain itu, gagasan *e-government* sangat bermanfaat dalam membangun pemerintahan yang baik untuk pemerintah yang baik, sehingga dapat dianggap bahwa *e-government* sangat memainkan peran penting dalam modernisasi pemerintahan (Kausar et al., 2022). Secara umum, kehadiran *e-government* dapat membantu proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan transparansi, yang dapat membantu membangun pemerintahan yang baik (Sudirman & saidin 2022)

Pada dasarnya tingkat keberhasilan *e-government* (e-Gov) bergantung pada sumber daya manusia. Secara teoritis, kualitas SDM dalam suatu perusahaan yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini akan dapat tercipta dalam suatu lingkungan kerja yang kondusif, yang antara lain dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang tepat (Sudirman, et, al, 2025) alTidak peduli seberapa canggih infrastruktur teknologi dan sistem informasi yang dibangun, efektivitas dan keberlanjutan e-Gov sangat bergantung pada kualitas, keterampilan, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem. Kesiapan sumber daya manusia pemerintah yang akan menjadi "pemain utama" atau subyek dalam inisiatif *e-government* pada dasarnya adalah orang yang bekerja di lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, tingkat kompetensi dan keahlian mereka sangat memengaruhi seberapa baik implementasi *e-government* berjalan. Pengetahuan SDM tentang teknologi informasi berkorelasi positif dengan kesiapan mereka untuk menerapkan konsep *e-government* (Indrajit, 2005; Sufi dan Herlinda, 2017).

*E-Government* mengatur kompetensi teknis dan non-teknis serta kemampuan manajemen SDM. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama dengan instansi pembina (seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Badan Siber dan Sandi Negara) sering menetapkan standar kompetensi untuk jabatan fungsional TIK, dimulai dengan Peraturan Presiden SPBE sebagai payung hukum. Standar kompetensi ini kemudian diperinci dalam Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah terkait manajemen ASN.

Salah satu tindakan nyata yang harus dilakukan untuk memanfaatkan teknologi adalah menerapkan *e-government*; ini dapat menawarkan banyak manfaat, seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan publik, kolaborasi dengan sektor swasta, dan peningkatan efisiensi dan transparansi pemerintahan (Adinda, 2025). Setiap lembaga pemerintah harus menerapkan *e-government* pada tingkat persiapan berikut (Habibullah, 2010; Salsabila et al., 2022). Dalam *e-government*, teknologi digunakan dalam berbagai aspek pemerintahan, (Andayani, 2024). Penerapan *e-government* merupakan tindakan nyata yang harus dilakukan untuk memanfaatkan teknologi. Penerapan *e-government* dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek, mulai dari pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan publik, kolaborasi dengan sektor swasta, serta peningkatan efisiensi dan transparansi pemerintahan (Adinda, 2019). Pentahapan dalam penerapan *e-government* disetiap Lembaga pemerintah

mengikuti (Habibullah, 2010; Salsabila et al., 2017). *E-government* melibatkan penggunaan teknologi dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk (Andayani, 2014).

## METODE

Untuk memahami dan menggambarkan fenomena penerapan *e-government*, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melihat dari sudut pandang informan dan menggali proses, makna, dan realitas yang terjadi secara alamiah. Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan keterlibatan informan yang dipilih secara purposive; data sekunder diperoleh dari laporan, dokumen, dan arsip yang relevan. Dengan menggunakan pedoman observasi dan wawancara sebagai alat bantu pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan; pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara, dengan triangulasi untuk meningkatkan keabsahan data. Uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas digunakan untuk memastikan bahwa data tersebut asli.

## PEMBAHASAN

### Konektivitas ICT

Pada kondisi saat ini, jaringan internet internal Diskominfo Kabupaten Jeneponto memiliki kualitas yang memadai dan andal (*reliable*). Ini secara efektif membantu berbagai tugas dan tugas harian pegawai pada instansi tersebut. Stabilitas ini sangat penting untuk menjamin operasional internal yang lancar, seperti pemrosesan data keuangan dan penggunaan aplikasi berbasis *web* yang khusus untuk Diskominfo Kabupaten Jeneponto. Dengan kata lain, infrastruktur dasar ICT yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Jeneponto sudah baik.

Namun, dari sudut pandang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, perbedaan kondisi jelas ada perbedaan digital yang signifikan dalam ekosistem pemerintahan daerah, seperti yang ditunjukkan oleh masalah jaringan yang tidak stabil dari sisi OPD. *Latency* (penundaan) yang tinggi dan kecepatan unduh yang unggah yang berubah-ubah adalah tanda ketidakstabilan ini yang sering terjadi, yang menyebabkan koneksi sering terputus sehingga hal ini bisa saja akan menghambat proses penyelesaian pekerjaan.

### Implementasi Terhadap Penerapan *E- Government*

Fenomena ini menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Jeneponto dan, secara lebih luas, Pemerintah Daerah masih menghadapi masalah besar dalam mencapai pemerataan kualitas jaringan di seluruh entitas terkait. Namun, ketersediaan jaringan yang konsisten dan stabil sangat penting untuk penerapan *e-government* yang berhasil dan berkelanjutan. Jika jaringan tidak stabil di OPD, efeknya akan berdampak lebih luas terhadap proses penyelesaian pekerjaan yang diantaranya:

- Hambatan Integrasi Data:** Ada hambatan dalam proses sinkronisasi dan integrasi data keuangan dan aset antara OPD dan Diskominfo Kabupaten Jeneponto. Tertundanya transaksi yang seharusnya segera terjadi dapat menyebabkan pelaporan dan pengambilan keputusan yang tidak akurat atau tertunda.
- Penurunan Produktivitas OPD:** Staf OPD akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah teknis daripada menyelesaikan tugas utama mereka. Ini akan berdampak negatif pada efisiensi pelayanan publik dan internal.
- Kegagalan Aplikasi:** Aplikasi *e-government*, seperti sistem penganggaran atau pelaporan, yang membutuhkan bandwidth dan stabilitas yang konsisten, mungkin tidak bekerja dengan baik di OPD, yang dapat menyebabkan pengguna tidak mau menggunakan sistem digital baru.

- d. Risiko Keamanan Data: Kerentanan keamanan, juga dikenal sebagai kerentanan keamanan, dapat muncul dari jaringan yang tidak stabil atau infrastruktur antar-OPD yang berbeda-beda. Kerentanan ini dapat mempersulit standarisasi protokol keamanan data.

## Penggunaan dan Integrasi ICT

Dengan menggunakan aplikasi digital ini dalam tata kelola keuangan daerah, Diskominfo Kabupaten Jeneponto telah menunjukkan kemajuan besar dalam adopsi teknologi. Memanfaatkan sistem penting seperti SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Daerah), SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), dan SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah) telah meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan keuangan daerah. Mulai dari penganggaran hingga pelaporan, sistem ini memungkinkan proses yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

Integrasi parsial yang telah dicapai merupakan pencapaian yang lebih signifikan. Fakta bahwa sistem ini memungkinkan data dan proses mengalir antar OPD menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Jeneponto telah berhasil melewati fase silo informasi dan memasuki tahap integrasi. Ini adalah dasar penting untuk mewujudkan satu data satu sumber kebenaran dan menyederhanakan proses pemerintahan daerah yang ada di negara ini agar tujuan pembangunan dapat direalisasi secara cepat dan tepat.

Pada situasi seperti ini bisa saja menimbulkan sejumlah masalah yang diantaranya:

- a. Potensi Kesalahan dan Penundaan: Pekerjaan manual selalu menimbulkan risiko kesalahan manusia dan menyebabkan penundaan, atau penundaan, dalam proses yang seharusnya otomatis. Ini mengurangi manfaat kecepatan aplikasi digital.
- b. Ketidakesesuaian Data (Inkonsistensi): Inkonsistensi dapat menyulitkan audit dan konsolidasi pelaporan jika ada dua versi data satu dalam sistem digital dan satu lagi dalam catatan manual.
- c. Hambatan Otomasi: Selama proses membutuhkan intervensi manual, pekerjaan manual berfungsi sebagai sumbatan yang menghalangi otomasi proses *end-to-end*. Ini berarti bahwa *e-government* tidak dapat mencapai tingkat efisiensi maksimalnya.

Situasi ini menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Jeneponto saat ini berada di titik tidak efektif, ia telah berhasil mengintegrasikan sistem, tetapi perlu secara proaktif menemukan dan mendigitalisasi area pekerjaan manual yang tersisa. Perhatian khusus yang harus diberikan pada beberapa sistem yang ada diantaranya:

- a. Penyempurnaan Integrasi: Memastikan bahwa antarmuka pengkodean aplikasi (API) sistem beroperasi dengan lancar secara manual.
- b. Penguatan Regulasi: mendorong kebijakan yang mengharuskan input data dilakukan hanya sekali di sumber awal (sumber sistem).
- c. Adopsi Teknologi Pendukung: Menghilangkan kebutuhan akan dokumen fisik dengan menggunakan teknologi seperti tanda tangan digital atau alur kerja elektronik, juga dikenal sebagai *e-workflow*.

## Pelatihan dan Kapasitas SDM

Pada Diskominfo Kabupaten Jeneponto, ada potensi besar untuk membantu transformasi digital. Pegawai sangat tertarik dengan pelatihan berbasis ICT. Sikap proaktif ini sangat membantu karena menunjukkan keinginan dan keinginan untuk belajar tentang sistem digital baru. Pelatihan juga telah terbukti membantu pegawai mengelola aplikasi penting seperti SIMAKDA dan SIPD.

Secara keseluruhan, dari perspektif dan kemampuan dasar, kesiapan pegawai dapat dinilai dengan cukup baik. Mereka adalah bagian penting dari tim yang akan bertanggung jawab untuk menjalankan sistem e-government. Meskipun fondasi mental dan keterampilan awal sudah ada, dua tantangan utama yang harus diatasi segera untuk mendukung transformasi digital secara keseluruhan diantaranya:

- a. Frekuensi Pelatihan yang Jarang: Karena sangat jarang, antusiasme dan efektivitas pelatihan

menjadi kurang baik. Dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, pengetahuan yang diperoleh hari ini dapat menjadi tidak relevan besok. Tidak adanya pelatihan reguler merusak kompetensi antara pengetahuan terbaru dan praktik sehari-hari. Selain itu, pelatihan sporadis membuat membangun budaya pembelajaran berkelanjutan, atau pembelajaran berkelanjutan, yang sangat penting untuk lingkungan kerja berbasis digital.

- b. Jumlah Tenaga IT yang Terbatas: Kekurangan tenaga spesialis IT merupakan kendala yang signifikan. Tenaga IT tidak hanya menjaga infrastruktur; mereka juga membantu pengembang sistem, mentor internal, dan pemecah masalah (*troubleshooter*) di lapangan. Kemampuan Diskominfo Kabupaten Jeneponto untuk melakukan inovasi internal atau memberikan dukungan teknis yang cepat dan memadai kepada seluruh OPD dikurangi oleh keterbatasan jumlah.

Dalam situasi ini, Diskominfo Kabupaten Jeneponto harus segera melakukan peningkatan kapasitas berkelanjutan demi untuk mendukung mengimplementasikan semua sistem yang ada. Strateginya harus yang harus dilakukan yakni rutin mengadakan kegiatan pelatihan terhadap sistem *e-government* yang baru, dan juga harus meningkatkan struktur dan sumber daya manusia untuk mendukung sistem *e-government* tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. Standarisasi Pelatihan Berjenjang: Mengubah pendekatan dari pelatihan spontan menjadi program pelatihan yang terstruktur, berjenjang, dan wajib dengan frekuensi yang lebih rutin, seperti kuartalan, untuk memastikan kompetensi tetap relevan.
- b. Investasi pada SDM Inti: Investasikan secara strategis dalam penambahan dan pengembangan tenaga IT, baik melalui pengangkatan pegawai baru maupun peningkatan kapasitas pegawai yang sudah ada, untuk membangun tim yang solid dan mampu mendukung seluruh proses digitalisasi.
- c. Pembentukan *Knowledge Sharing Internal*: Buat tim *champion* atau *super-user* di setiap bidang atau subdivisi yang bertanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan dan memberikan bimbingan teknis tingkat awal, yang mengurangi beban pada tim IT inti.

Diskominfo Kabupaten Jeneponto memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia menjadi kapasitas yang dapat diandalkan yang siap mendukung transisi menuju pemerintahan yang sepenuhnya digital dengan mengatasi keterbatasan terkait pelatihan dan tenaga kerja IT.

## Kebijakan dan Regulasi

Dengan menjadikan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program ICT, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jeneponto Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah menunjukkan komitmen formal terhadap transformasi digital. Menurut peneliti ini merupakan langkah awal penting untuk memastikan bahwa inisiatif digital di daerah selaras dengan visi yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional demi untuk mewujudkan pembangunan yang merata disetiap daerah.

Namun, penerapan kebijakan SPBE di tingkat lokal, terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset, menghadapi tantangan yang signifikan karena lingkungan regulasi yang berubah dan kadang-kadang bertentangan. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto adalah regulasi yang tidak konsisten di antara kementerian dan regulasi yang sering diubah oleh pemerintah pusat, menurut sumber informasi yang didapatkan dalam proses penelitian ini seperti:

- a. Inkonsistensi Lintas Sektoral: Peraturan tentang keuangan daerah yang dibuat oleh Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri sering kali berbeda atau tidak sejalan dengan peraturan tentang teknologi informasi yang dibuat oleh BSSN. Misalnya, regulasi keuangan mungkin tidak setuju dengan persyaratan teknis untuk keamanan siber. Karena ketidakselarasan ini, DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto harus menafsirkan dan menyesuaikan sistem secara manual, yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang banyak.
- b. Perubahan Aturan yang Cepat: Regulasi sering berubah karena sifatnya yang dinamis, terutama

yang berkaitan dengan teknologi baru dan manajemen keuangan. Ini sering membuat sistem aplikasi yang baru dibuat atau diintegrasikan usang sebelum waktunya. Misalnya, jika Permendagri atau PMK mengubah struktur anggaran atau pembagian aset, dapat menyebabkan penyesuaian besar-besaran pada aplikasi seperti SIMAKDA atau SIMBADA dalam waktu singkat.

## Implikasi Terhadap Implementasi E-Government

Kondisi ini jelas menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan antara tingkat pusat (pembuat undang-undang) dan tingkat daerah (pelaksana). Ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesiapan untuk menerapkan *e-government* di DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto diantaranya hal – hal seperti ini akan dapat mengakibatkan:

- Menghambat Stabilitas Sistem: DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto harus terus beradaptasi dengan peraturan baru, yang memerlukan biaya penyesuaian sistem, validasi ulang data, dan pelatihan ulang pegawai karena setiap perubahan peraturan.
- Mengurangi Efisiensi: Perbaikan kepatuhan regulasi menghabiskan waktu dan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk membangun fitur baru atau meningkatkan pelayanan publik.
- Meningkatkan Risiko Kepatuhan: Jika ada ketidaksesuaian dalam regulasi, DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto dapat menghadapi masalah karena mematuhi satu regulasi dapat melanggar regulasi lainnya, yang meningkatkan risiko hukum dan audit.

Untuk mencapai digitalisasi penuh, menurut peneliti pihak DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto harus secara proaktif menyampaikan masukan terkait kebutuhan untuk harmonisasi regulasi kepada Pemerintah Provinsi dan bekerja sama dengan instansi teknis terkait di tingkat pusat untuk memastikan bahwa sistem yang sudah dibangun dapat beroperasi dalam lingkungan hukum yang jelas, stabil, dan terintegrasi.

## Infrastruktur dan Keamana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur komputer dan aplikasi DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto cukup tersedia dan dapat membantu operasi digital. Sebagian besar orang yang menjawab mengatakan bahwa perangkat keras seperti komputer dan laptop serta aplikasi inti seperti SIMAKDA, SIPD, dan SIMBADA telah digunakan secara teratur untuk membantu proses pengelolaan keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto secara teknis telah membangun dasar untuk pelaksanaan *e-government*.

Namun, ada beberapa kelemahan yang masih menjadi masalah diantaranya:

- Pertama, jaringan belum sepenuhnya stabil. Beberapa orang yang menjawab mengeluhkan jaringan yang lambat, terutama di tengah hari atau ketika banyak aplikasi digunakan secara bersamaan. Karena sistem digital hanya berfungsi dengan baik dengan koneksi internet yang cepat dan stabil, kondisi ini mempengaruhi seberapa efektif pelaksanaan *e-government*.
- Kedua, tidak semua unit kerja memiliki akses ke fasilitas cadangan. Namun, sistem cadangan sangat penting untuk menjalankan *e-government* untuk menjaga keberlanjutan layanan publik dan mencegah hilangnya data saat terjadi gangguan atau bencana. Jumlah backup yang tidak seimbang menunjukkan bahwa infrastruktur DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto masih membutuhkan peningkatan dalam proses pengimplementasiannya.
- Ketiga, Untuk keamanan sistem dan data, penggunaan nama pengguna dan kata sandi masih cukup. Teknik pengaman dasar ini sangat penting, tetapi mereka tidak mencukupi untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Sampai saat ini, DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto belum menggunakan teknologi keamanan canggih seperti firewall, enkripsi data, multi-factor authentication (MFA), dan sistem deteksi intrusi/IPS. Selain itu, prosedur standar prosedur (SOP) untuk menangani insiden siber belum ada di semua tempat. Jika terjadi kebocoran data atau serangan siber, hal ini berpotensi menimbulkan bahaya besar. Mengembangkan *e-government*

membutuhkan dua elemen penting: infrastruktur dan keamanan.

## **Aplikasi, Layanan dan Akses Informasi Publik**

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari responden, DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto Pemerintah Kabupaten Jeneponto sangat siap untuk menerapkan *e-government* dalam hal aplikasi, layanan, dan akses informasi publik. Keberhasilan ini terutama dinilai dari sudut pandang masyarakat dan pengguna. Sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto dinilai ramah pengguna (*user-friendly*) dan mudah digunakan. Keberhasilan adopsi sistem bergantung pada desain yang terstruktur dan mudah dipahami ini. Aplikasi yang mudah digunakan membuat proses input, verifikasi, dan pelaporan staf internal dan OPD lebih efisien dan mengurangi kesalahan. Selain dari itu, aplikasi ini sangat mendukung transparansi laporan. Aplikasi digital mendukung pemerintahan yang akuntabel dengan memastikan jejak audit yang jelas dan memudahkan publikasi data keuangan secara terstruktur.

DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto telah memanfaatkan kanal digital resmi untuk menyediakan layanan informasinya. *Website* DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto dan portal SIPD, atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah, berfungsi sebagai jalur resmi di mana masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dengan menyediakan informasi digital, DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto memastikan transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan yang baik, menunjukkan komitmen DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto untuk mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diantaranya dengan:

- a. Aksesibilitas yang Luas: Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi jam kerja fisik kantor.
- b. Ketersediaan Data Publik: Media, akademisi, dan publik dapat secara mandiri mengawasi penggunaan anggaran dan perkembangan pembangunan. Meskipun persiapan di bidang ini sudah baik, upaya harus ditingkatkan untuk inovasi layanan.

Selanjutnya, DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto harus mempertimbangkan beberapa hal untuk:

- a. Meningkatkan Interaktivitas: Beralih dari penyedia informasi pasif menjadi platform yang memungkinkan interaksi dua arah, seperti *chatbot* layanan informasi keuangan atau forum konsultasi publik.
- b. Harmonisasi Data Lintas Portal: memastikan bahwa data di portal DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto konsisten dan real-time dengan data di portal daerah dan nasional lainnya.

Dengan demikian, pencapaian ini menunjukkan bahwa DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto telah membangun fondasi untuk pelayanan publik berbasis digital, menggunakan teknologi sebagai alat yang berguna untuk mendukung keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan proses pembangunan.

## **Analisis secara menyeluruh terhadap kesiapan implementasi *E-Government* pada DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto.**

Kesiapan Implementasi *E-Government* pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jeneponto berada pada kategori cukup siap, tetapi belum mencapai kondisi optimal, berdasarkan tinjauan menyeluruh terhadap berbagai dimensi implementasi ICT. Diskominfo Kabupaten Jeneponto telah membangun fondasi digital yang solid dan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transformasi, tetapi masih menghadapi beberapa permasalahan penting yang menghambat kemajuan proses implementasi.

Menurut peneliti terdapat beberapa pilar kekuatan yang penting untuk melanjutkan proses transformasi digital mendukung kapasitas Diskominfo Kabupaten Jeneponto diantaranya:

- a. Aplikasi Digital dan Integrasi Data: Penggunaan sistem inti seperti SIMAKDA, SIPD, dan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

119



SIMBADA menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Jeneponto telah berhasil melewati tahap adopsi aplikasi dan sekarang mulai memasuki tahap integrasi. Dinilai bahwa aplikasi mudah digunakan dan efektif, dan membantu mengalirkan data antar-OPD, yang merupakan syarat penting untuk satu sumber kebenaran.

- b. Keterbukaan Informasi Publik: Diskominfo Kabupaten Jeneponto telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas (*good governance*) dengan menjadikan website Diskominfo Kabupaten Jeneponto dan portal SIPD sebagai kanal resmi untuk akses informasi.
- c. Dukungan Pegawai yang Adaptif: Antusiasme tinggi pegawai terhadap pelatihan dan kemauan untuk mengadopsi teknologi baru menunjukkan bahwa elemen sumber daya manusia non-IT memiliki mentalitas yang siap untuk mendukung transformasi digital.

Meskipun fondasi kuat, beberapa masalah penting menghambat kinerja operasional diantaranya salah satu masalah infrastruktur paling mendasar adalah stabilitas jaringan Internet (konektivitas). Jaringan internal Diskominfo Kabupaten Jeneponto memiliki kualitas yang baik, tetapi ketidakstabilan jaringan di tingkat OPD menyebabkan kesenjangan digital, yang menghambat akses yang sama dan keamanan data, dan mengurangi efisiensi aplikasi yang terintegrasi.

Keterbatasan Jumlah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia IT. Pelatihan yang jarang dan jumlah tenaga spesialis IT yang terbatas menjadi kendala. Keterbatasan ini menghambat inovasi, melemahkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah teknis dengan cepat, dan menghalangi pertumbuhan kapasitas yang berkelanjutan. Keamanan Data dan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk Insiden Siber. Keamanan siber masih sangat lemah, hanya bergantung pada *username* dan *password*.

Karena teknologi keamanan lanjutan seperti multi-factor authentication (MFA/IDS) dan prosedur operasi standar (SOP) penanganan insiden siber yang terus menerus, data keuangan di sektor tertentu lebih rentan terhadap serangan siber dan kegagalan sistem. Saat ini, Diskominfo Kabupaten Jeneponto cukup siap, tetapi belum optimal. Meskipun integrasi dan sistem telah mengatasi masalah ini, ketahanan dan keamanan sistem sangat berbahaya.

Untuk mewujudkan *e-government* yang efisien, efisien, dan berkelanjutan, Diskominfo Kabupaten Jeneponto harus segera memperkuat strategis empat area prioritas. penguatan infrastruktur jaringan serta audit dan peningkatan menyeluruh terhadap stabilitas dan kualitas jaringan di seluruh operasi pendukung Untuk menjamin kelangsungan operasi, ini juga mencakup investasi pada fasilitas cadangan dan Rencana Pengembalian Bencana (DRP). Peningkatan Kapasitas SDM untuk menciptakan program pelatihan berjenjang yang rutin dan meningkatkan dan memberdayakan jumlah tenaga IT inti untuk dapat mendukung proses digitalisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penguatan Sistem Keamanan dapat mengubah pengamanan dari sekadar dasar menjadi berlapis dengan menerapkan lapisan keamanan lanjutan dan menyusun dan menguji prosedur operasional standar (SOP) penanganan insiden siber secara berkala. Sinkronisasi regulasi pada pemerintahan pusat dan daerah perlu secara proaktif menyampaikan umpan balik kepada regulator pusat (kementerian atau lembaga terkait) melalui pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa regulasi selaras dan konsisten. Menurut peneliti hal seperti ini akan bisa mengurangi perbedaan aturan dan mengurangi beban penyesuaian sistem yang cepat dan mahal. Diskominfo Kabupaten Jeneponto memiliki kemampuan untuk berubah dari organisasi yang cukup siap menjadi pelopor *e-government* yang ideal, percaya diri, dan aman di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## KESIMPULAN

Dalam hal kesiapan implementasi *E-Government* dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan pada DISKOMINFO Kabupaten Jeneponto berada dalam kategori cukup siap, tetapi belum optimal. Aplikasi inti (SIMAKDA, SIPD, dan SIMBADA) dan keterbukaan informasi publik telah membangun fondasi digital, tetapi masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera. Keunggulan utama terletak pada implementasi aplikasi dan layanan digital yang mudah digunakan, keterbukaan informasi

publik melalui portal dan website resmi SIPD, dukungan fleksibel untuk staf non-IT, dan keinginan besar untuk mengikuti pelatihan ICT.

Hambatan utama termasuk kebijakan yang tidak konsisten antara pemerintah pusat dan daerah, jumlah tenaga IT yang terbatas, stabilitas jaringan yang tidak merata dalam bagian, dan sistem keamanan data yang masih bergantung pada *username* dan *password*. Problem-problem ini menyebabkan penurunan efisiensi integrasi data, penundaan layanan publik digital, risiko keamanan siber, dan kendala dalam menjaga keberlanjutan layanan. Oleh karena itu, untuk mencapai standar pemerintahan digital yang efisien, aman, dan berkelanjutan, kesiapan *E-Government* dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan DISKOMINFO harus diperkuat.

## REFERENSI

- A. Banerjee, E. Duflo, C. Imbert, S. Mathew, R. Pande. (2018). E-governance, accountability, and leakage in public programs: experimental evidence from a financial management reform in India, *Am. Econ. J. Appl. Econ.* 12 (4) (2018) 39–72.
- Adinda, D. P., Jenderal, U., Yani, A., & Kualitas, T. (2019). Pengaruh Penerapan *E-government* Terhadap. 02(01).
- Adnan, M., Ghazali, M., & Othman, N. Z. S. (2017). E-participation within the context of *e-government* initiatives: A comprehensive systematic review. *Telematics and Informatics Reports*, 8(May), 100015. <https://doi.org/10.1016/j.teler.2017.100015>
- Al-Kautsar Maktub, M., Handayani, P. W., & Sunarso, F. P. (2019). Citizen acceptance and use of the Jakarta Kini (JAKI) *e-government*: Extended unified model for electronic government adoption. *Heliyon*, 11(2), e42078. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e42078>
- Atique, M., Htay, S. S., Mumtaz, M., Khan, N. U., & Altalbe, A. (2014). An analysis of E-governance in Pakistan from the lens of the Chinese governance model. *Heliyon*, 10(5), e27003. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2014.e27003>
- Cosquillo Lavado, S. G. (2016). Gobierno Digital y la Gestión Municipal en la Municipalidad Provincial de Tarma. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5 (2), 2018-2032. [https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v5i2.413](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i2.413)
- Darmawan Napitupulu dkk. (2018). *E-government: Implementasi, Strategi, dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2018). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Djabbari, M. H., Irfan, B., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2014). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 158-170.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge
- Heriyanto. (2017). Urgensi Penerapan E – Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal Of Public Administration*.
- Kausar, S., Said, M. M., & Sekarsari, R. W. (2017). E-Readiness Dalam Penerapan Online Single Submission (OSS) Di Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 14(8), 26–34.
- Kennedy, A., Surya, W., & Wartoyo, F. (2014). Tantangan dan Solusi Penerapan *E-government* di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 134 - 147. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459>
- Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2016). Future of *e-government*: An integrated conceptual framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 173(December 2018), 121102. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.121102>.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (2016). *Implementation and Public Policy*.

- Nookhao, S., & Kiattisin, S. (2013). Achieving a successful *e-government*: Determinants of behavioral intention from Thai citizens' perspective. *Heliyon*, 9(8), e18944. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2013.e18944>
- Payong, Yohanes. (2019). Penerapan E-Government Dalam mendukung tata kelola Pemerintahan Menuju Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Kupang. *JURNAL INOVASI KEBIJAKAN*. Volume IV, Nomor 1, 2019 Hal. 1-19.
- Pratama, D. P., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2013). Penerapan Kolaboratif *E-government* Pada Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 205–236. Retrieved from <https://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/481>.
- Rifdan, Haerul, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2014). Analisis penerapan *e-government* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan tallo kota makassar. *Jurnal Governance and Politik (JPG)*, 4, 49–61.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2018). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi *E-government* Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2017). Penerapan *E-government* Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314–324. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i2.65>
- Sismar, A., Syah, S. R., & Sudirman, S. (2023). Analisis Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Financial Multi Finance Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 413-419.
- Sismar, A., Syam, A. W., & Supardi, E. (2025). Analisis penerapan gaya kepemimpinan dan faktor motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada pt indomarco primatama makassar. *Jurnal pemerintahan, politik anggaran dan adiminstrasi publik*, 5(1), 258-269.
- Sudirman, S., Larafista, J., Rahmi, R., & Maryam, M. (2024). Pengaruh Sistem Digital terhadap Kinerja Karyawan di Kampus Politeknik LP3I Makkassar. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 1(12), 1034-1042.
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2017). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E- Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44–58. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.269>
- Sufi, W., & Herlinda, D. (2017). Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (Sapk) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 9(2), 102–108. <https://doi.org/10.31849/nia.v9i2.2103>
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.